



**Disharmoni Kehidupan Beragama Intra Islam
Pada Majelis Ta'lim Perempuan Di Aceh**

Rasyidah* , Mustabsyirah Husein , Husna Amin***, Dwi Dendi****, Masrizal*******

Email: rasyidah@ar-raniry.ac.id

** Lecturer Department of Islamic Education, Faculty Tarbiyah and Teacher Training
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh-Indonesia

Email: mustabsyirahhusin@ar-raniry.ac.id

***Department of Aqidah and Filsafat, Faculty of Usuluddin and Humanities, Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

Email: husnaamin@ar-raniry.ac.id

**** Researcher of Women's Studies Center Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda
Aceh-Indonesia

Email: dwi.dendi@ar-raniry.ac.id

, *****Lecturer Department of Sociology Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh-Indonesia.

Email: masrizalfisip@unsyiah.ac.id

Received :

Accepted :

Published :

ABSTRACT

This paper explains the disharmony of intra-Islamic religious life at the women Majelis Ta'lim in Aceh. Majelis Ta'lim as one of the local wisdoms in Aceh which is still practiced as a community school that educates women/mothers in the community. This should be able to become a pillar that strengthens the peaceful role of women. However, this becomes difficult, because of there is disharmony situation in religious interactions in the women's Majelis Ta'lim. Whereas the peaceful energy possessed by women should be maximized to build intra-Islamic religious harmony. This study uses a qualitative approach, using data collection techniques through interviews, observations and FGDs. The results of the study show that there are three issues of disharmony experienced by women in the Majelis Ta'lim. First, the immature attitude in responding to various differences in practice among members of PERTI, NU and Muhammadiyah. Second, there is resistance by women's groups to the presence of salafi/wahabi groups, which according to them, have taught a different understanding of religion and are not familiar with their religious understanding. Third, the emergence of competition between the followers of the Teungku Majelis Ta'lim, both in terms of teaching substance and in terms of popularity, which causes disharmony

Keywords : disharmony, majelis, ta'lim, women

✉ Corresponding author:

Email Address: rasyidah@ar-raniry.ac.id

Received: April 29, 2022; Accepted: September 18, 2022; Published: September 30, 2022

Copyright © 2022 Rasyidah, Mustabsyirah Husein, Husna Amin, Dwi Dendi, Masrizal DOI:

<http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i2.13211>

ABSTRAK

Tulisan ini menjelaskan disharmoni kehidupan beragama intra Islam pada majelis ta'lim kaum ibu (perempuan) di Aceh. Majelis Ta'lim sebagai salah satu kearifan lokal di Aceh yang sampai sekarang masih tetap dipraktikkan dengan pola sekolah yang mencerdaskan kaum ibu di masyarakat, seyogyanya mampu menjadi pilar yang memperkuat peran damai kaum ibu. Namun hal ini menjadi tidak mudah mengingat sekarang adanya kondisi disharmoni yang melanda interaksi keberagamaan kaum ibu di Aceh. Padahal energi damai yang dimiliki kaum ibu dapat dimaksimalkan untuk membangun harmoni intra Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpul data melalui wawancara, observasi dan FGD. Hasil kajian menunjukkan ada tiga isu disharmoni yang dialami perempuan di Majelis Ta'lim. Pertama, adanya sikap kurang dewasa dalam merespon berbagai perbedaan amalan yang bersumber dari organisasi Islam seperti PERTI, NU dan Muhammadiyah. Kedua, adanya keresahan sebagai bentuk respon spontan terhadap munculnya kelompok salafi/wahabi yang membawa konsep berbeda dari amalan yang mainstream di masyarakat. Ketiga, munculnya persaingan antar pengikut teungku pengajian, baik dari segi substansi, maupun dari segi popularitas yang dapat merenggangkan keharmonisan sesama.

Keywords : *disharmoni, majelis, ta'lim, perempuan*



1. INTRODUCTION

Beberapa tahun terakhir, keharmonisan intra Islam di Aceh terusik kembali. Juni 2015, sekelompok umat Islam menghentikan pelaksanaan Shalat Jumat di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, dan menuntut harus sesuai Mazhab Ahlus Sunaah wal Jama'ah (2015, serambinews.com). September 2015, ribuan massa yang sebagian besarnya santri dayah di Aceh, melakukan aksi pawai damai di ibukota Banda Aceh, untuk menolak aliran Wahabi (2015, benarnews.org). Oktober 2017 terjadi pembakaran salah satu masjid milik Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, yang disinyalir sebagai tindakan intoleransi dari kelompok Islam lainnya (2017, Republika.co.id). Juni 2019, sekelompok umat Islam membubarkan kajian Daurah Islamiyah di Masjid Al-Fitrah, Keutapang, Banda Aceh karena dinilai berpaham wahabi (2019, kumparan.com). Januari 2020, hal yang sama terulang kembali di Mesjid Oman Banda Aceh (2020, kumparan.com). Fenomena ini menegaskan tentang menguatnya disharmoni kehidupan beragama intra Islam di Aceh.

Disharmoni juga dialami dalam interaksi kaum ibu di majelis Ta'lim. Hal ini menjadi kondisi yang bertolak belakang dengan tujuannya, mengingat majelis ta'lim kaum ibu (*beut kaum mak*) merupakan kelompok potensial yang dapat diandalkan dalam membangun keberagaman yang damai (Wattimena & Hutabarat 2021). Hanya saja majelis ta'lim ini belum berfungsi secara efektif untuk mencerdaskan sebagaimana fungsi yang diharapkan. Ada empat alasan mengapa majlis ta'lim kaum ibu ini menjadi pilar penting untuk membangun harmonisasi kehidupan beragama di Aceh: pertama, kelompok perempuan memiliki energi damai yang kuat, Shonhaji (2017,17) menyebutnya dengan *soft power*. Kedua, majelis ta'lim kaum ibu merupakan lembaga sosial keagamaan yang paling aktif di setiap gampong untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berkontribusi terhadap ketahanan sosial masyarakat (Abdul Basit, 251-168), termasuk di Aceh. Ketiga, majelis ta'lim beranggotakan kaum ibu yang merupakan pilar pelaksana sistem pendidikan di keluarga, yang dituntut untuk cerdas, harus lebih maju satu tingkat di atas atau setidaknya setara dengan pengetahuan anak (Farhan, dkk, 2020, 168). Keempat, relasi keanggotaan majelis ta'lim terikat secara emosif dan sosial, karena majelis ta'lim merupakan salah satu lembaga dakwah yang teruji strategis mengembangkan kehidupan bermasyarakat (Putri dkk., 2019, 46). Mengingat strategisnya kelompok ini, maka potensi disharmoni yang ada di majelis ta'lim seyogyanya segera diatasi agar tidak melemahkan fungsi utamanya. Akan tetapi, alih-alih menjadi proses yang memperkuat semangat harmonisasi, justru sebagian majelis ta'lim malah menjadi tempat yang subur bagi munculnya disharmonisasi.

Saat ini, fungsi majelis ta'lim yang berkembang di Aceh adalah sebagai tempat belajar Islam, ajang silaturahmi, pengembang budaya Islam-khususnya seni Islam seperti kelompok shalawatan, dan marhaban, serta menjadi pusat komunikasi dan informasi. Meski informasi yang dimaksud masih seputar berita sakit, meninggal atau ada kunjungan sosial di antara anggota, namun mampu berkontribusi memperkuat modal sosial. Kenyataan menunjukkan bahwa, kegiatan sosial kemanusiaan yang menjadi pilar interaksi masyarakat di Aceh,

✉ Corresponding author:

Email Address: rasyidah@ar-raniry.ac.id

Received: April 29, 2022; Accepted: September 18, 2022; Published: September 30, 2022

Copyright © 2022 Rasyidah, Mustabsyirah Husein, Husna Amin, Dwi Dendi, Masrizal DOI:

<http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i2.13211>

umumnya dileading oleh kelompok majelis ta'lim kaum ibu. Beberapa pihak telah berupaya mendorong peningkatan peran majelis ta'lim dalam berbagai sisi. Analiansyah, (Analiansyah, dkk., 2015) meneliti dua majelis ta'lim di daerah pesisir Aceh Besar dari segi management dan kepemimpinannya. Tujuannya untuk mempersiapkan majelis ta'lim sebagai lembaga yang mampu mendukung dan membina anggotanya juga keluarga anggota. Realitas di atas sebenarnya menggambarkan potensi yang besar dari Majelis Ta'lim kaum ibu untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kehidupan beragama intra Islam yang harmonis dan mencegah disharmoni. Sufian Suri menuliskan tentang model pendampingan terhadap majelis ta'lim, spesifiknya mendorong proses pengajian yang partisipatif. Tujuannya agar mampu memaksimalkan majelis ta'lim sebagai media belajar yang mampu mencerdaskan pesertanya. Salah satu yang ditawarkannya adalah dengan pemetaan kebutuhan materi, dan menyusun materi pengajian berdasarkan kebutuhan (Suri, 2019). Upaya penguatan majelis ta'lim yang dilakukan merupakan wujud kesadaran akan pentingnya eksistensi majelis ta'lim dalam memperkuat masyarakat secara umum, tidak terkecuali dalam mencegah disharmoni.

Disharmoni intra Islam di Aceh menggelisahkan banyak kalangan, memunculkan rasa saling curiga dan ketidakpercayaan satu sama lain. Thomas (2015) menyebutkan, kecurigaan tinggi terhadap perbedaan kerap menjadi pemicu keretakan di tengah-tengah masyarakat bahkan acap kali berujung konflik dan kekerasan. Padahal agama seharusnya memainkan peran penting untuk mengisi ruang publik dengan hal yang positif, sehingga terwujud keharmonisan (Casonova 1994). Robert N Bellah (2000) berdasarkan analisisnya terhadap pengalaman keberagamaan di Amerika Serikat; juga berdasarkan hasil penelitiannya tentang keberagamaan di Tokugawa, Jepang, dan Perancis, menyebutkan bahwa terdapat ragam cara agama-agama dalam menginternalisasi ajarannya. Ada yang mementingkan membangun spirit damai, dan ada yang sebaliknya hingga bisa memunculkan konflik antar keyakinan, antar agama, bahkan memuncak menjadi perang sipil/perang saudara. Dengan ini Bellah menegaskan tentang kekuatan pemahaman agamalah yang mampu membawa pengikutnya pada kecenderungan damai dengan konsep pluralitas atau pertikaian dan eksklusifitas.

Islam sebagai agama yang menghargai perbedaan sebagai rahmat, merupakan agama yang sangat terbuka. Namun pemahaman keislaman bisa saja terbentuk menjadi sangat eksklusif atas dasar berbagai kepentingan. Eksklusifitas yang kemudian menimbulkan disharmoni pada komunitas yang terbatas akses informasi dan lemah bargainingsnya, termasuk pada kelompok perempuan, bahkan di majelis ta'lim yang seyogyanya menjadi media memperkuat silaturahmi. Kondisi inilah yang menjadi latar penelitian ini dengan fokus mengungkapkan kedisharmonisan yang terjadi pada kelompok majelis ta'lim agar diketahui upaya pencegahan perluasannya. Penelitian dilakukan dengan mengobservasi aktifitas majelis ta'lim, wawancara teungku, pengurus dan jamaahnya dan meneliti dokumen terkait lainnya.

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Majelis Ta'lim

Majelis Ta'lim merupakan sekolah cerdas bagi masyarakat dan wadah untuk mendapatkan pendidikan agama Islam, merupakan tempat berlangsungnya pangajaran, pendidikan agama Islam yang paling fleksibel dan tidak terikat oleh tempat dan waktu. Fleksibilitas Majelis Ta'lim inilah yang menjadi kekuatan sehingga mampu bertahan sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal yang paling dekat dengan umat (masyarakat). Majelis Ta'lim juga merupakan wahana interaksi dan komunikasi yang kuat antara masyarakat dengan para *mu'allim* (guru agama) dan antara sesama anggota jamaah.

Dalam “*Regulasi Majelis Ta’lim; Pedoman Pembinaan Majelis Ta’lim*” (Depag RI: 2009), setidaknya ada sembilan fungsi dan peran Majelis Ta’lim yang dapat dikembangkan: *pertama*, memperkuat fungsi Majelis Ta’lim sebagai tempat pengajaran agama Islam secara luas, yang meliputi pengkajian tentang pokok-pokok ajaran Islam dan kaitannya dengan persoalan sehari-hari yang dihadapi oleh umat Islam itu sendiri. *Kedua*, meningkatkan fungsi Majelis Ta’lim dari tempat penyelenggaraan pengajian menjadi wahana melakukan kaderisasi umat Islam. Kaderisasi adalah suatu sistem menyiapkan generasi yang akan datang. *Ketiga*, mengembangkan fungsi konseling. Sebagai salah satu lembaga pendidikan non formal, Majelis Ta’lim bertanggung jawab untuk mendidik dan membantu jamaahnya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat serta mampu memecahkan berbagai persoalan hidup yang dihadapi. *Keempat*, menjadikan Majelis Ta’lim sebagai pusat pengembangan keterampilan atau *skill* jamaah. Setiap muslim idealnya mampu berperan ganda dalam kehidupannya, yaitu sebagai ‘*abid* (penyembah Allah) dan sekaligus sebagai *khalifah fil ardh* (orang yang memakmurkan bumi). *Kelima*, meningkatkan peran pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi dan sosial. Majelis Ta’lim bisa menjadi media sosial dalam mengkomunikasikan upaya-upaya pembangunan umat, baik secara lahir maupun batin. *Keenam*, menjadikan Majelis Ta’lim sebagai wadah silaturahmi dan rekreasi ruhani. *Ketujuh*, mengembangkan fungsi sebagai pusat komunikasi dan informasi. *Kedelapan*, mengembangkan peran sebagai tempat berkembangnya budaya Islam. *Kesembilan*, menjadikan Majelis Ta’lim sebagai lembaga kontrol sosial (*social control*). Dengan fungsi control ini, eksistensi Majelis Ta’lim akan semakin diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Abdidin (2019) menyebutkan majlis taklim dapat dipandang sebagai sebuah solusi untuk dijadikan sebuah lahan penanaman bibit-bibit demokrasi, toleransi dan multicultural demi mekarnya keharmonisan antar dan intra umat beragama.

2.2 Pluralitas, Disharmoni dan gender

Pluralitas, baik plural secara eksternal dengan agama lain atau pluralitas di internal Islam sendiri, merupakan realitas alamiah. Di Indonesia terdapat enam agama yang diakui sebagai agama resmi negara. Namun dalam kenyataannya jumlah inipun semakin plural ketika berkombinasi dengan kultur, etnis, aliran, paham ataupun yang lainnya. *Heresiography* Amir Mihna dan Áli Kharis dalam kitab: *Jaami’al Firaq wa Madzahih Islamiyah* menyebutkan:”ditemukan berbagai sekte dan aliran dalam Islam yang jumlahnya lebih kurang 204 kelompok. Sebagian besar kelompok tersebut dapat dikatakan sebagai kelompok atau aliran pemikiran (*School of Thought*), seperti aliran Sunni menjadi mazhab Maliki, Hanafi, Syafii dan Hanbali. (Rahman, 2010).

Pluralitas ini merupakan bagian kekayaan kehidupan yang bermanfaat bagi masyarakat manusia. Namun fakta sejarah menunjukkan bahwa selain fakta positif terdapat juga fakta negatif sebagai akibat pluralitas agama, diantaranya disharmoni, perpecahan dan konflik yang diawali dengan sikap eksklusif (Lestari, 2020). Perbedaan sekecil apapun adalah bagian dari manifestasi konflik dalam bentuk yang lunak, yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik dalam skala besar atau keras (Kriesberg & Neu, 2018). Hendropuspito (1983, 151-152) menyebutkan ada 4 bentuk kedisharmonisan dan konflik sosial yang bersumber dari agama yaitu :

- 2.2.1 Perbedaan doktrin dan sikap: Dalam konteks ini konflik sebagai fakta sosial melibatkan minimal dua pihak (golongan) yang berbeda agama atau aliran, bukannya sebagai konstruksi khayal (konsepsional) melainkan sebagai fakta sejarah yang masih sering terjadi zaman sekarang juga.
- 2.2.2 Perbedaan suku ras dan pemeluk agama

- 2.2.3 Perbedaan tingkat kebudayaan: bahwa masyarakat yang berkebudayaan kuat cenderung lebih terbuka dan rasional dalam beragama sementara masyarakat yang berkebudayaan lemah cenderung fanatik dan emosional¹
- 2.2.4 Masalah mayoritas dan minoritas pemeluk agama.

Pluralisme yang muncul sebagai respon baru mensikapi pluraritas dengan semangat kebersamaan tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Karena pemahaman seperti ini akan justru mengedepankan kesan fragmentasi, perbedaan dan bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak dapat dipahami sebagai upaya menghapuskan fanatisme. Pluralisme harus dipahami sebagai “pertalian sejati kebinekakaan dalam ikatan-ikatan keadaban”(*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*) yaitu kesepakatan saling menghargai dalam perbedaan (Suryadi, 2017).

Keragaman pemahaman dalam Islam menuntut kearifan semua pihak dalam mensikapi perbedaan. Saling memahami adalah harapan yang tersembunyi dibalik klausul “perbedaan adalah rahmat”, dan kekerasan pastinya bukan terjemahan kata “*hikmah*” sebagai salah satu prinsip dakwah (Kurniawati, 2021). Potensi kedisharmonisan dan konflik karena pluralitas ini akan sangat rentan pecah jika tidak dikelola dengan baik apa lagi jika masing-masing bersikap eksklusif. Namun demikian, dalam perspektif Dahrendorf, konflik merupakan jalan menuju perubahan sosial yang dimulai dengan terbentuknya kelompok. Terdapat kelompok semu, kelompok kepentingan dan kelompok konflik dalam masyarakat. Diantara kelompok kepentingan terdapat kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, baik disadari atau tidak, dikelola atau tidak. Sebaliknya terdapat juga kelompok kelompok kepentingan antagonis yang mengarah pada konflik (Izza, 2020).

Dalam situasi disharmoni dan konflik sebagai implikasi kegagalan manage keberagaman, kerap sekali kelompok yang memiliki bargaining yang lemah lah yang rentan menjadi korban. Kelompok perempuan di Aceh memiliki bargaining lemah dalam sosial budaya masyarakat yang patriarkhi, termasuk di majelis ta’lim. Bargaining yang lemah dan keluarga dan masyarakat, mengkontruksi stereotipe bagi perempuan sebagai kelompok yang tidak perlu banyak dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Sehingga ruang yang terbuka bagi kelompok perempuan menjadi terbatas. Majelis ta’lim salah ruang terbuka bagi kaum ibu ini, meski memiliki banyak keterbatasan juga. Dianggap hanya untuk mengakaji hal-hal dasar saja, tidak dianggap perlu memahami berbagai diskursus yang ada dalam Islam. Hal ini menyebabkan terbatasnya wawasan keislaman yg didapatkan sehingga sebagiannya cenderung eksklusif. Kekerbatasan wawasan juga yang menjadi latar sikap kelompok ibu di majelis ta’lim yang relatif tidak siap merespon berbagai perbedaan dalam pemahaman keagamaan.

3. METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pegumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan Focus Group Discussion (FGD) di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Barat Daya. Narasumber penelitian berjumlah 69 orang yang terdiri: 3 orang dari Dinas Syariat Islam, 2 orang dari Kantor Kementerian Agama, 3 orang pimpinan

¹ Amirulkamar, S., & Hidayati, U. (2023, December). A Model of Extreme Poverty Reduction to Prevent Social Inequality in Indonesia Perspective of Sociology and Islamic Law. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 23, No. 2, pp. 215-228).

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), 5 orang dari kalangan Organisasi pengembang majelis ta'lim, 6 tokoh masyarakat/adat, 6 tokoh agama, 6 penceramah laki-laki dan perempuan, dan 38 orang pengurus majelis ta'lim. Sementara observasi dilakukan terhadap aktifitas di majelis ta'lim, dan kehidupan beragama intra Islam. Sedangkan FGD dilakukan pada pengurus Majelis ta'lim di Abdya, Banda Aceh dan Aceh Besar untuk menggali bersama pandangan kolektif terhadap perbedaan yang ada.

4. FINDINGS AND DISCUSSION

Terdapat beberapa afiliasi lembaga/organisasi *mainstream* yang menjadi rujukan majelis ta'lim kaum ibu dalam menerapkan praktik ibadahnya, yaitu Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Muhammadiyah. NU dan Muhammadiyah adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yang eksis di seluruh daerah di Indonesia. PERTI merupakan nama organisasi Islam nasional yang berawal di Sumatera Barat, pada 20 Mei 1930, lalu meluas hingga ke daerah lain di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, meski tidak seluas Muhammadiyah dan NU. Selain itu PERTI dan NU secara umum hampir sama praktik ibadahnya. Pada perkembangan selanjutnya, muncul kelompok afiliasi majelis ta'lim yang baru yang disebut sebut masyarakat sebagai kelompok wahabi. Dalam Perspektif Dahrendorf, keberadaan afiliasi ini merupakan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan yang sama, lalu bersatu dalam nama organisasi. Akan tetapi antar kelompok kepentingan ini dapat menjadi kelompok-kelompok antagonis.

Masing masing lembaga/organisasi dalam beberapa praktik ibadah memiliki perbedaan. Ry, dari Kemenag Abdya, menyebutkan:

Memang ada pemahaman dan praktek ibadah berbeda antara Muhammadiyah dan PERTI. Tetapi di seluruh kecamatan ada pengikut Muhammadiyah dan PERTI. Meski secara administrasi organisasi, PERTI tidak serapi Muhammadiyah, tetapi secara gerakan kultural PERTI lebih massif. Indikatornya: pada pelaksanaan Shalat Tarawih, lebih banyak mesjid 20 rakaat dari pada yang 8 rakaat. Selama ini perbedaan tidak ada masalah. Contohnya di Kecamatan Susoh, di daerah pantai seperti Pawoh, Pawoh Hilir lebih banyak pengikut Muhammadiyah, maka jika ada yang meninggal, semua yang berta'ziah akan memahami bahwa tidak adanya kenduri (wawancara, 2019)

Perbedaan ini sejak lama dipahami oleh masyarakat, namun ada spirit yang dibangun untuk tetap harmoni meski ada beberapa hal yang berbeda. Akan tetapi, dinamika ini tidak statis karena kecenderungan disharmoni mulai mengelisahkan. Hal ini menegaskan tentang apa yang disampaikan oleh Kriesberg dan Neu (2018), bahwa sekecil apa pun perbedaan merupakan manifestasi konflik, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan disharmoni dan konflik yang besar. Hasil penelitian menunjukkan ada tiga konteks disharmoni intra Islam yang dialami kelompok perempuan. Pertama, disharmoni yang berasal dari perbedaan amalan furu' Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) dan Muhammadiyah. Kedua disharmoni yang terkait dengan munculnya kelompok Salafi. Ketiga, disharmoni yang bersumber dari pertentangan substansi pengajian antar teungku, lalu mengarah pada truth claim dan munculnya persaingan antar pengikut teungku pengajian, baik dari segi substansi, maupun dari segi popularitas. Dalam hal ini termasuk juga disharmoni karena perbedaan pemahaman peran publik perempuan, khususnya pada majelis ta'lim yang dipimpin oleh teungku inong.

4.1 Disharmoni yang berasal dari perbedaan praktik beberapa ibadah pengikut 'NU/PERTI² dan Muhammadiyah.

Konteks disharmoni ini dialami kaum ibu di wilayah Aceh Barat Daya dengan peta potensi latent disharmoni antara Muhammadiyah-NU/PERTI. Hampir semua narasumber penelitian secara lisan menyebutkan tidak ada masalah disharmoni antara pengikut Muhammadiyah dan PERTI di Abdya. Tegasnya, semangat publik yang ingin ditunjukkan oleh beberapa narasumber penelitian adalah: masyarakat Abdya tidak ada masalah disharmoni yang berasal dari perbedaan amalan keislaman baik NU, Muhammadiyah atau pun PERTI. Akan tetapi hal ini tidak serta merta membuktikan perbedaan tersebut tidak menimbulkan disharmoni. Karena beberapa hasil wawancara lainnya menunjukkan fakta berbeda. Mr. Salah seorang pengurus Aisyiah (Organisasi di Muhammadiyah untuk kaum ibu) menyebutkan:

Ada juga sekarang pengajian yang mengajarkan “kenduri maulid” tidak boleh”. Lalu berkembang isu, ini ajaran yang dibilang oleh orang Muhammadiyah, padahal kami dari kalangan Muhammadiyah sangat menjaga hal ini dan tidak menyinggungnya dalam pengajian yang sifatnya umum. Lalu belakangan disebutkan bahwa itu dari kalangan wahabi. Tapi ujung-ujungnya malah Muhammadiyah dibilang Wahabi juga”. Narasumber tertawa kecil mentertawakan realitas yang dia ceritakan (Wawancara).

Bahasa disharmoni tersirat juga tampak dari proses FGD dengan pengurus majelis ta'lim. Salah seorang pengurus Majelis ta'lim dari kalangan PERTI/NU, menyebutkan:

Kalau kami dari Kecamatan Babahrot ke Lembah Sabil belum pernah mendengar Muhammadiyah dan PERTI beda, nggak ada. Kalau ada yang meninggal, kalau PERTI kan ada kenduri sampai 7 hari. Sementara yang Muhammadiyah air putih pun kadang nggak ada. Begitu bawa jenazah, sudah diam gitu aja. Kami pun yang ngunjung sudah diam nggak ada mempersalahkan, karena sudah tahu. Misalnya kami mau pergi takziah kami tanya misalnya PERTI apa Muhammadiyah? Kalau Muhammadiyah kami dah paham aja salam aja. Kalau PERTI sebelum kita minum teh paling kurang, nggak dikasih pulang. (wawancara Ai, Pengurus Majelis Ta'lim)

Pendapat ini disampaikan Ai dengan nada sedikit menyindir pada point “tidak ada minuman apapun pada rumah duka dari kalangan Muhammadiyah”, dan nada suara bangga ketika menyebutkan adat kebiasaan di rumah duka ala PERTI/NU. Pendapatnya ini kemudian memancing pandangan dari salah seorang pengurus pengajian ibu-ibu Muhammadiyah, yang menyinggung persoalan kenduri kematian, bahwa ada yang sampai berhutang, menggadaikan tanah, dan menyayangkan jika ada anak yatim yang ditinggalkan. Lalu secara terburu buru dan sedikit tinggi suara, pengurus pengajian dari kalangan PERTI berkata: “oo tidak begitu, kalau kami buat kenduri, tidak sepeser pun sumbangan yatim kami pakai untuk kenduri. Itu memang untuk yatim. Untuk kenduri memang ditanggung bersama”. Peserta lain menimpali (juga dari kalangan PERTI), biasanya kalau ada kenduri meninggal misalnya, lalu ada keluarga bawa minuman sampai berkotak kotak, kan nggak lucu kalau kita simpan aja”. Beberapa pengurus pengajian lainnya juga turut berargumentasi membantah ungkapan

pengurus pengajian tersebut. Pada akhirnya pengurus pengajian dari kalangan Muhammadiyah memilih diam. Sekilas tampak ia ingin menimpali, tapi kemudian memilih untuk diam.

Sementara di Aceh Besar terdapat pemahaman awam anggota pengajian (NI, 52 thn) yang menganggap Muhammadiyah sebagai organisasi yang salah dan harus di jauhi. Akses informasi kelompok kaum ibu yang terbatas menyebabkan informasi dari tokoh rujukan diterima dengan mudah, tanpa ada perbandingan informasi lainnya. Sementara sebagai daerah yang menjadi pusat aktifitas pemerintahan provinsi berbagai kepentingan menguat dan dekat dengan kehidupan masyarakat termasuk kaum ibu. konteks Banda Aceh dan Aceh besar, tidak sesederhana Abdy. Ada banyak kepentingan kelompok yang berkolaborasi dengan perbedaan ajaran Islam ini sehingga sulit sekali memetakan situasinya secara jelas. RI (Teungku Inong Banda Aceh), menyebutkan: selain itu ada pula kelompok yang memang memiliki niat lain untuk memanaskan suasana. Niatnya adalah "*beu i lop pateng lam bara*" (Bahasa Aceh, artinya apa yang disampaikan harus bisa diterima sepenuhnya oleh pendengar). Dengan kondisi ini maka isu disharmoni pada konteks Banda Aceh dan Aceh Besar, cenderung lebih serius. Karena banyak kelompok yang selalu berusaha mempengaruhi kaum Ibu melalui pengajian agar ide ide mereka bisa diterima, meski berbeda dengan pemahaman yang mengakar di masyarakat.

Jika di Abdy interaksi kaum ibu dalam beragam kelompok dekat dan dapat terjembatani karena wilayahnya yang terbatas dan interaksinya masih kuat, berbeda dengan Banda Aceh dan Aceh Besar yang interaksi antara lembaga lembaga afiliasi ini cenderung terbatas dalam pengetahuan kaum ibu.

4.2. Disharmoni karena munculnya majelis-majelis yang disebut-sebut sebagai "wahabi"/salafi

Kondisi ini ditemukan di Abdy, Banda Aceh dan Aceh Besar dengan respon berbeda. Pada situasi Abdy dengan jumlah kepadatan penduduk yang tidak terlalu banyak dibanding Banda Aceh dan Aceh Besar, perbedaan atau hal yang baru dapat dengan mudah di petakan. Salah Seorang ulama di Abdy (AR, 60 thn) menyebutkan:

"ada dua titik pengajian Salafi yang ada di Abdy yaitu di Geulumpang Payung dan Susoh. Cirinya adalah sangat mudah menyirikkan orang, dan membid'ahkan orang. Secara fisik berjanggut dengan celana panjang agak gantung. Mereka bukan dari kelompok mana mana, tapi kelompok baru. Muhammadiyah juga kurang suka juga dengan mereka itu". Untuk Salafi ini telah ada fatwa MPU Aceh yaitu "sesat menyesatkan"³. Dimana setelah diperiksa oleh MPU ajaran salafi ini berbeda dari segi aqidah dan syariah. Dari segi aqidah ada ajarannya bahwa Allah ada tempat di Arasy." Mantan Ketua MPU menambahkan: "jadi dipahami ada kursi seperti kursi dan duduknya manusia" (wawancara)

Apa yang dipahami oleh beberapa narasumber memiliki sandaran yaitu Fatwa MPU Aceh tahun 2014 (<https://mpu.acehprov.go.id/index.php>) yang melarang aktifitas kelompok tersebut. Akan tetapi, terkait ini, kelompok Salafi telah pula mengirimkan klarifikasinya secara terbuka salah satunya melalui media serambi online. Intinya kehadiran majelis-majelis baru dianggap telah menimbulkan kegelisahan dan memicu disharmoni. Menurut Ry, dari Kemenag Abdy:

awalnya tidak ada masalah disharmoni, tapi belakangan ini (suara narasumber mengecil) muncul aliran Salafi (orang dayah menyebutnya wahabi) yang telah

membuat pengajian di dua titik di Blang Pidie. Rata rata mereka adalah pemuda dan remaja yg haus ilmu, haus kajian. inilah yang agak bergejolak sedikit. Dari MPU ada datang ke Kemenag, terlibat juga Polres dan Kodim. Kalau masyarakat di lokasi pengajian, tidak mau terima bahkan ada semacam diskusi terbuka yg diundang mereka. sistemnya didekati orang berpengaruh yang punya akses ke mesjid tertentu, lalu mulai pengajiannya. Pematerinya dari Medan, Jakarta, Tapak Tuan, Meulaboh, Pengajian ini menyentuh perbedaan dengan penilaian yang berbeda pula.

Ry menambahkan, di satu sisi ada hal positif yang dikembangkan melalui kelompok salafi ini, yaitu pemberdayaan ekonomi, anggota pengajiannya diberi pekerjaan. Namun dari segi strategi menurut Ry, kelompok ini telah salah. Baru beberapa bulan hadir di Abdya, kelompok salafi ini sudah membahas titik persinggungan yang selama ini selalu di jaga oleh Muhammadiyah, PERTI dan NU. Peringatan Maulid disebut bid'ah, pakaian pengikutnya berubah.

Keberadaan salafi di Abdya menjadi sangat kontras dengan pengajian lainnya sehingga jelas tertangkap perbedaannya. Ajaran yang juga disertai dengan simbol identitas menjadikan kelompoknya mudah terdeteksi. Pengurus Aisyiah Mr, menyebutkan

“anggota pengajian ini yang perempuan tidak boleh lagi berbedak, berlipstik. Di rumah tidak boleh ada foto foto dan gambar. Kalau laki laki pakai celana panjang gantung. Awalnya mereka ini ada yang ikut di Banda Aceh, lalu buat pengajian di Abdya undang yang di Banda Aceh, terus begitu perlahan jadi lebih ramai. Pengajiannya seperti biasa aja, tapi substansi ajarannya ada yang berbeda. Ada yang bilang bilang ini wahabi, tapi ada juga yang bilang wahabi ini Muhammadiyah. Memang ada juga anggota Muhammadiyah yang ikut ikut, tapi mereka ini yang kurang dasar agamanya, sementara yang kuat dasar agamanya tidak terpengaruh lagi.”

Kondisi di atas menggambarkan isu disharmoni yang dialami kelompok perempuan baik yang bergabung dalam NU, PERTI ataupun Muhammadiyah dikarenakan munculnya kelompok baru yang disebut sebut sebagai salafi. Keresahan muncul terutama dengan masuknya beberapa anggota kerabat dalam pengajian, lalu berubah penampilan, berubah cara pandang terhadap agama. Perubahan dan hal hal baru lainnya, turut juga mendorong beberapa orang untuk menghadiri pengajian salafi ini, karena ingin tahu. Ada yang kemudian berhenti setelah sekali datang, dan ada yang terus berlanjut. Sebagian narasumber penelitian meyakini bahwa masyarakat yang terpengaruh dengan pengajian ini adalah yang tidak kuat dasar agamanya, sementara yang kuat dasarnya tidak terpengaruh dengan hal ini. Akan tetapi secara umum narasumber penelitian menyebutkan materi pengajian salafi ini banyak yang asing mereka (My, Ls, Mr dan T).

Hal mendasar yang meresahkan juga adalah klaim haram dari kelompok Salafi terhadap amalan yang telah mengakar di masyarakat Aceh, seperti menyebut bahwa Peringatan Maulid adalah haram. Sementara dalam keyakinan masyarakat Aceh, bulan maulid diperingati sepanjang 100 hari dengan kenduri di rumah, di meunasah, di mesjid, *tabligh akbar*, shalawatan, dll. Peringatan Maulid sangat ditunggu tunggu oleh masyarakat dan diyakini bersedekah makanan melalui kanduri maulid merupakan sedeqah yang mencerminkan kecintaan kepada Rasulullah sehingga sangat besar pahalanya. Praktek yang telah berjalan lama dan mengakar inilah yang salah satunya di gugat oleh kelompok

salafi sebagai praktek yang bid'ah. Bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang tidak ada dan tidak dikenal di zaman Nabi (al-'Afraj, 2013,12). Konotasi bid'ah ini dianggap negatif oleh masyarakat, maka disebut bid'ah dapat menimbulkan kemarahan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan Rn (Kemenag Abdy):

“Sebenarnya strategi yang digunakan oleh kelompok Salafi inilah yang memicu penolakan, dimana dalam waktu yang masih sangat baru kelompok ini sudah mengharamkan banyak praktek yang mengakar dalam masyarakat Aceh. Beda dengan kondisi antara Muhammadiyah, PERTI dan NU, meski banyak perbedaan, ketiganya menahan diri untuk tidak menyinggung praktik praktik yang berbeda.

Berbeda dengan Aceh Barat Daya, konteks isu salafi telah ada sejak lama di Banda Aceh dan Aceh Besar, dan semakin menguat akhir akhir ini. Fi salah seorang ulama Aceh menyebutkan bahwa kelompok Salafi yang besar ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. hal ini juga telah di publish pada web resmi MPU Aceh. Dalam perspektif sosiologi, hal ini dapat dimaklumi, mengingat Kota Banda Aceh adalah pusat pemerintahan provinsi Aceh, sehingga sebagian besar resources terkumpul di Kota ini, termasuk di wilayah sekitarnya yaitu Aceh Besar. Ragam pengajian berkembang dan bermunculan dengan cepat di daerah ini. Akan tetapi menurut Rh, salah seorang Teungku Inong, pimpinan dayah yang telah 20 tahun lebih berceramah di banyak Majelis Ta'lim kaum ibu: sejauh ini yang tetap mampu bertahan lama di tangan masyarakat bawah adalah alumni dayah dengan praktik keagamaan yang sesuai dengan mainstream di masyarakat. Masyarakat menurutnya selektif, dengan memilih teungku ngaji dengan mempertimbangkan: lepasan atau alumni mana? Alumni Samalanga dan Labuhan Haji menurutnya disenangi masyarakat kampung. Masyarakat juga selektif terkait mazhab apa dan aqidahnya apa?. Terkait banyaknya pemahaman keagamaan saat ini, Rh memandangnya secara positif dengan merujuk “perbedaan adalah rahmat”. Harus melihat apa yang berbeda, bukan serta merta menghakimi. Duduk bersama, tanyalah lihatlah, apa masalahnya? Statement ini diarahkan narasumber untuk merespon perbedaan ajaran yang dikembangkan oleh kelompok salafi dengan harapan kelompok salafi harus lebih bijak melihat situasi. Rh menyebutkan:

Sebenarnya tidak masalah pengajian jika ada perbedaan, semestinya juga tidak jadi masalah. Apa lagi pada hal hal yang terkait sunnah, anjuran yang tidak tergolong hal pokok. Contohnya: Kita pergi ke tempat orang meninggal, di hadapan jenazah, ada teungku yang mengajarkan sebaiknya dianjurkan berdoa, berzikir saja di dalam hati sebagai bentuk *taḍabbur*. Sementara masyarakat sejak lama mempraktekkan baca shalawat, Surat Yasin walau mayat masih ada. Ini kondisi yang berbeda dengan yang disampaikan teungku tersebut, yang mengajarkan supaya diam dan bertadabbur. Saya paham dan tahu yang disampaikan teungku tersebut benar, tapi masyarakat awam ini tidak bisa dia, tidak bisa bertadabbur, melainkan bercerita, mengobrol, dan ribut di sana. Maka dari dulu dulu masyarakat mengaji Yasin, jadi ada positifnya. Tapi karena teungku ini membuat maklumat tentang ini, maka berbenturan lah, kacaulah dan bingung masyarakat. Kalau saya lebih memilih mengalah, benar yang beliau bilang, kalau kita sanggup mengambil pelajaran maka ini terbaik, tapi orang awam ini tidak begitu mereka, malah mengobrol dan ini bisa melukai keluarga yang sedang musibah. Maka lebih baik mengaji Yasin dapat mengobati kesedihan keluarga yang musibah. Tapi teungku tersebut tidak melihat ini malah saling memojokkan pemahaman yang lama.

Bagi Rh selaku Tgk. Inong, persoalan isu disharmoni terkait salafi dan wahabi adalah pada tataran kegelisahan yang muncul di masyarakat karena ajaran baru yang disampaikan

kelompok salafi telah membuat masyarakat gamang tentang mana yang benar dan salah, sehingga menimbulkan perpecahan. Akan tetapi di lain sisi Rh juga terkesan tidak mendukung sikap yang tidak berdasar dalam merespon isu wahabi yang berkembang di Aceh. Menurutnya:

Kadang kadang kita ini ada pendapat yang sedikit berbeda sudah di bilang wahabi. Bagaimana mendefenisikan wahabi? Yang berjenggot seperti suami saya itu wahabi? Orang alumni Universitas Islam Negeri (UIN) juga disebut wahabi? Anak anak bersorak oooo wahabi ...wahabi lewat di depan dayah saya. (maksudnya anak anak lain menyebut anak anak di dayah Rh sebagai anak anak wahabi). Saya bilang, nak jangan di balas, tapi mereka marah juga dengan ejekan ini. Saya bilang sama santri saya, yang bilang alumni UIN wahabi, itu salah bukan begitu wahabi. Saya jelaskan pelan pelan, saya sebut umi pun nggak pasti juga yang mana saja wahabi. Lama lama ada juga beberapa wali yang khawatir dan pindahkan anak dari sini. Nah inilah yang terjadi di kampung kampung, istilah wahabi malah digunakan untuk menjatuhkan pihak atau orang yang berbeda dengan dia.

Apa yang digambarkan Rh menunjukkan ada “keresahan buta” di masyarakat khususnya kaum ibu terhadap isu wahabi. Dibanding isu salafi, isu wahabi tampak lebih meresahkan masyarakat. Ada konotasi negatif yang dihembuskan sebagai wacana publik terkait wahabi, sampai sekelompok anak anak menggunakan kata “wahabi” sebagai cemoohan. Lalu sekelompok anak lainnya merasa malu dan marah atas cemoohan ini seolah tahu bahwa wahabi yang dicemoohkan ke mereka adalah hal yang buruk. Sekelompok ibu turut pula termakan dan memindahkan anak ke dayah yang lain. “Keresahan buta” juga tampak dari ungkapan salah seorang pengurus MT di Aceh Besar yang mengatakan dengan berbisik sarat emosif “hati hati dengan Muhammadiyah bu..itu wahabi”. Ketika ditanya kenapa? Dijawab “sesat”. Lalu ditanya lagi sesat bagaimana? Jawabnya, “pokoknya begitu yang dibilang teungku”. Salah seorang tokoh masyarakat yang diwawancarai di Aceh Besar, Ms, malah bertanya kepada peneliti, “apa sebenarnya salafi itu? Kenapa orang orang memepersalahkan? Bukannya ada istilah dayah salafi, atau bagaimana?”. Pertanyaan Ms ini mengindikasikan keawaman masyarakat terkait isu salafi, bahkan mereka juga masih mempertanyakan kenapa hal ini menjadi masalah?. Keresahan buta ini juga ditegaskan oleh Rt, salah seorang ulama perempuan Aceh:

MT kaum ibu di Kota Banda Aceh, biasanya lebih pasif menerima perbedaan dan lebih memilih mengambil langkah diam. Kecuali sudah *ta yok yok...*(Bahasa Aceh, maksudnya: sudah kita dorong dan desak). Pengen cari tahu? Nggak ada. Kebanyakan masih besifat seperti *sami'na wa ata'na* (artinya: kami dengar, lalu kami mematuhi) atau *sami'na wanasiina* (artinya: kami dengar, tapi kami lalu lupa). Contohnya: begitu masuk ke kontent serius saja, mau diskusi kita dengan mereka, kita stagnan mereka nggak ada bahan untuk berdiskusi selain mendengarkan saja. Padahal ini pengurus. Sekarang lebih parah lagi karena ibu ibu merasa nggak perlu lagi baca buku, sebab sudah dengar TV dan internet. Ini krn berawal dari nggak ada alat alat canggih seperti android, dll, lalu sekarang ada ini dan itu alat alat canggih (dengan segala fitur unik dan lengkap). Sementara pendidikan kaum ibu ini terbatas.

Apa yang disampaikan Rt, menegaskan bahwa sebenarnya di level pengajian ibu ibu ini, polemiknya tidak sampai menjangkau isu yang berat berat sekali seperti sesat dan

menyesatkan, melainkan lebih kepada kebingungan terkait mana yang benar dan layak diamalkan. Tidak jarang akhirnya mereka mengabaikan informasi baru ini karena bingung. Rt menyampaikan:

Jadi respon mereka terhadap perbedaan kurang, tapi ada yang merespon di belakang. Kenapa si A bilang begini lalu si B bilang begitu? ah nggak usah dua dua. Ini karena lelah dengan kebingungan ya udah biar aja. Ada juga yg bilang: '*lon semayang yg lageh nyoe mantong hana pah, bek geupernoe yg laen le*'. (Bahasa Aceh, artinya: saya shalat yang seperti biasa aja belum sempurna, nggak usah diajarkan yang baru lagi).

Pemahaman baru dengan mesjid mesjid khusus juga menjadi fenomena baru di Banda Aceh. Mh, salah seorang pengurus MT Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa:

Di Banda Aceh ini ada kelompok yang ekstrim pemahamannya dan menilai orang di luar kelompoknya salah. Tetangga saya ada yang demikian, padahal silaturahmi kami bagus dan baik saja, tetapi jika kita datang ke mesjid tersebut, sikapnya seperti tidak suka.⁴

Beragamnya konteks tantangan keberagaman di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar merupakan tantangan tersendiri. Sehingga meskipun berbagai resources terpusat di dua daerah ini, tetap saja sulit untuk berbuat banyak. Apa lagi, isu ini cenderung belum dipahami kelompok perempuan secara lebih baik, atau dapat dikatakan masyarakat mengalami "keresahan yang buta". Buta maksudnya tidak memiliki informasi yang memadai, melainkan hanya merujuk apa yang disampaikan teungku. Karena informasinya terbatas, keresahan ini justru menjadi lebih kuat.

4.3 Disharmoni yang bersumber dari pertentangan substansi pengajian antar teungku, dan munculnya persaingan antar pengikut teungku pengajian, baik dari segi substansi, maupun dari segi popularitas

Pada prinsipnya kondisi ini ada ditemukan di ketiga lokasi penelitian, hanya saja intensitas yang tinggi lebih tampak di Banda Aceh dan Aceh Besar. Beberapa narasumber dengan gamblang menyampaikan keresahannya terkait hal ini. Rt, anggota MPU Aceh Besar menyebutkan:

Contoh saya diundang ceramah di salah satu tempat yang teungku lain juga pernah berceramah di sana. Lalu muncul di kepala saya, bagaimana cara supaya bisa diundang beberapa kali lagi. Maka mulailah menyalah nyalahkan penceramah lain selaku saingan di tempat pengajian ini. Dengan suara tinggi dan marah Rt menambahkan: Ini penyakit. Tapi ini ada. Ini terjadi diantara penceramah. Lalu Rt menutup dengan keluhan berat dalam bahasa Aceh, '*nyan keuh, nyan yang hek ta pike*' (Bahasa Aceh, artinya: nah inilah yang capek kita pikirkan).

Dari cara RT menyampaikan hal ini, jelas terlihat sikap beberapa penceramah ini telah menjadi bagian yang meresahkan Rt. Hal ini merupakan bibit munculnya *truth claim*, dengan tujuan mendulang pengakuan dari semakin banyak orang.

Penceramah di Aceh Besar Teungku Inong Rh, mengaku mengalami hal ini dalam beberapa bentuk situasi:

1. Pertama menurutnya, ada teungku pengajian di bale pengajian lain di desa yang sama dengannya menyatakan apa yang disampaikannya yang benar, yang lain salah.

⁴ Wawancara dengan Mh, Pengurus MT di Banda Aceh, tanggal 7 Spetember 2019

Sementara sebagian jama'ah yang menghadiri pengajiannya adalah juga jama'ah di tempat lain. Sehingga jama'ah menjadi bingung dan ada yang bertanya untuk konfirmasi ke Rh. Menurut Rh:

Dari segi pemahaman benar ada khilafiyah, tetapi khilafiyahnya bukan pada persoalan yang *qat'iy*. Kalau kemudian saling menjelekkkan ini karena ada kepentingan lain, yaitu agar masyarakat berbondong bondong membenarkan ia, dan menjatuhkan yang lain. Kalau saya tidak mau berbantah atau membalas. Apalah arti berdebat dengan orang yang seperti itu. Karena Islam adalah agama yang santun.

2. Pengalaman lain yang dialami Rh Menurutnya ada Teungku yang memberitahu kepada santrinya bahwa pengajian Rh adalah dari kelompok Wahabi, sehingga anak anak tersebut mencemoohkan santri dayah Rh dengan ejekan wahabi.
3. Rh juga mengaku pernah terjadi tengku dari bale lain di gamponnya, bersama dengan perangkat gampong, membatalkan acara kaum ibu karena dianggap hal yang tidak terlalu penting. Rh berpendapat sikap sikap yang merendahkan perempuan ini menjadi tantangan baginya karena ada tengku tengku gampong yang mendiskreditkan perempuan. Rh menambahkan:

“Kalau ada ceramah ibu ibu yang beradu dengan kegiatan kaum Bapak, boleh di geser, sedih nggak kita?. Dianggap kegiatan kaum ibu kalau nggak adapun tidak masalah. Jangan kan di dukung mendapat perhatian pun tidak. Nah tengku tengku yang begini biasanya tengku tegku yang muda muda. Teungku tengku yang muda ini nggak jelpun alumni mana. Dia ngaji di Ulee Titi hari ini, besok dah ke tempat lain lagi, besok ke tempat lain lagi. Lalu sudah merasa berilmu. Dia tidak fokus dan menetap di salah satu dayah dengan serius mengaji kitab sampai detail. Kalau yang fokus tidak pulang pulang di salah satu dayah, biasa disebut *Meudagang*. Kenapa disebut berdagang? Karena berdagang dengan Allah mengharap pahala lillahi ta'ala. Kalau tidak menetap, tidak dapat menyerap juga sepenuhnya bagaimana perilaku abu di malam hari, subuh, pagi dan siang. Tidak ada abu bertengkar atau merendahkan yang lain. Perempuan juga dimuliakan tidak ada direndahkan. Tapi teungku teungku muda ini justru berperilaku merendahkan perempuan.

Pengalaman Teungku Inong Rh ini menjadi catatan realitas interaksi diantara teungku pengajian yang saling membenarkan atau saling meyalahkan. Situasi ini pastinya akan meresahkan jama'ah. Pada tataran kedekatan jama'ah sudah sangat yakin dengan apa yang disampaikan teungkunya, lalu dianggap salah oleh jama'ah teungku yang lain, maka dapat menimbulkan disharmoni⁵.

Hal senada juga terjadi di pengajian lain yang dialami Teungku Fw yang memberikan pengajian di lima MT di Aceh Besar. Mw selain mendatangi MT untuk menjadi penceramah, juga membuka pengajian di rumahnya untuk kaum Bapak pada malam tertentu. Selain itu di siang hari Mw ramai dikunjungi tamu yang ingin mendapatkan pengobatan dari berbagai penyakit. Banyak sekali yang datang ke sana hingga Mw sudah bisa membangun ruang khusus untuk tempat zikir pengobatan dan pengajiannya. Akan

⁵ Misbah, T. L., Ashura, K., Wirianto, D., Masrizal, M., & Rustan, E. (2023). Application of the structural guidance model for muallaf banda aceh in strengthening education islamic values. *Relações Internacionais no Mundo Atual*, 3(41), 382-396.

tetapi setahun lalu menurut Mw, beberapa pengajian tidak lagi mengaji dengannya, pengunjung yang berobat serta merta sepi. Awalnya Mw tidak tahu sebabnya, namun kemudian ia mengetahui bahwa ada fitnah yang dialamatkan untuknya bahwa dirinya *meujen* (Bahasa Aceh, maksudnya: di tubuhnya ada jin. Ini berarti dia dianggap berteman dengan makhluk ghaib dan ilmunya ilmu hitam). Lalu beberapa majelis ta'lim ada yang menggantikan tengku Mw dengan tengku lainnya. Salah seorang pengurus pengajian tempat Mw mengajar ngaji menjelaskan:

Biasalah bu, ini banyak yang iri hati karena teungku Mw tidak berhenti mengajar ngaji, khutbah Jum'at di mana mana, lalu yang berobat ke tempat beliau juga bermobil semua mewah mewah. Pastilah yang ada penyakit di hatinya, jadi iri bu. Apa lagi yang menginginkan beliau itu hancur, bagaimana caranya pasti akan dilakukan oleh mereka untuk membuat Mw hancur.

Gambaran dari pengalaman nara sumber di atas menunjukkan bahwa persaingan antar penyaji, baik secara substansi pengajian, maupun dari segi popularitas, telah pula berkontribusi menjadi isu disharmoni di tengah kelompok kaum ibu. Bahkan hal ini juga telah menjadi kegelisahan bagi penceramah yang peduli dengan situasi ini.

5. CONCLUSION

Demikianlah tiga isu diharmonisasi yang dialami oleh kelompok kaum ibu di Aceh. Ketiganya berdampak pada kualitas harmonisasi intra islam. Isu yang pertama terkait kedewasaan merespon perbedaan amalan yang bersumber dari PERTI, NU dan Muhammadiyah. Isu kedua terkait keresahan yang muncul sebagai respon spontan terhadap munculnya kelompok salafi/wahabi yang membawa konsep berbeda dari amalan yang mainstream di masyarakat. Isu disharmoni ketiga muncul sebagai akibat dari pertentangan substansi pengajian antar teungku dan persaingan antar pengikut teungku pengajian, baik dari segi substansi, maupun dari segi popularitas. Secara teoritis, prosesnya berawal dari adanya perbedaan, lalu terbentuk kelompok-kelompok yang sama kepentingannya, dan kelompok kepentingan antagonis. Kondisi ini membutuhkan manajemen yang baik, sehingga perbedaan yang ada sebagai *soft conflict* tidak berubah menjadi disharmony, bahkan konflik yang lebih besar. Interaksi sosial yang telah lama ada antara jama'ah dari kalangan PERTI/NU dan Muhammadiyah telah mengkonstruksi manajemen sosial mensikapi perbedaan dengan membatasi persinggungan di isu yang berbeda. Hanya saja ini masih rapuh karena kesadaran perbedaan masih di permukaan. Apa lagi respon yang selama ini ada cenderung bersifat "keresahan buta", tidak berbasis informasi yang memadai. Perbedaan yang belum dipahami secara tuntas inilah yang menyebabkan munculnya berbagai kecanggungan interaksi, disharmoni dan bahkan konflik.

ACKNOWLEDGMENTS

Penghargaan setuluskan disampaikan untuk Lembaga Penelitian UIN AR-Raniry Banda Aceh Indonesia yang telah memfasilitasi proses penelitian ini.



REFERENCES

- Abidin, Zaenal, (2019), Majlis Talim (Islamic Forum) And Harmonizing Inter Faith Communication, *INJECT Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 4, No. 1, <http://dx.doi.org/10.18326/inject.v4i1.115-136>
- Analiansyah, (2015), PAR Berbasis Majelis Ta'lim di Kajhu Aceh Besar, *Hasil Penelitian*, Banda Aceh, Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Ar-Raniry
- Basit, Abdul, (2010), Pemberdayaan Majelis Ta'lim Perempuan Dalam Perspektif Manajemen Dakwah, *Jurnal Komunika*, Volume 4, Nomor 2, <https://media.neliti.com/media/publications/146553-ID-pemberdayaan-majelis-talim-perempuan-dal.pdf>
- Bellah, Robert N, (2000), *Beyond Belief, Esai-Esai tentang agama di dunia Moderen, menemukan kembali Agama*, terj. Rudy Harisah Alam, Jakarta, Paramadina.
- Departemen Agama RI, (2009), *Pedoman Pembinaan Majelis Ta'lim*”, Jakarta, Depag RI
- Hendro Prasetyo, (2002), Ali Munhanif, dkk, *Islam dan Civil Society: Pandangan Muslim Indonesia*, Jakarta: Gramedia bekerjasama dengan PPIM-IAIN Jakarta
- Izza, Yogi Prana, (2020), Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf, *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol.9, No.1 <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v9i1.283>
- Kallen, Horrace M, 1992, “Radicalisme” dalam Edwin RA Selingman, *Encyclopedia of The Sosial Sciences*, Vol.XIII-XIV, New York, Macmillan Company
- Kriesberg, Louis & Joyce Neu, (2018), *Conflict Analysis and Resolution as a Field: Core Concepts and Issues*, Oxford Research Encyclopedia, International Studies, [Doi: 10.1093/acrefore/9780190846626.013.512](https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.512)
- Kurniati, Nia, (2021), Al-Hikmah Dalam Dakwah Islamiyah, *Jurnal Dakwah & Sosial*, Volume 1 No. 1, DOI: <https://doi.org/10.29313/hikmah.v1i1.7577>
- Lestari, Julita, (2020), Pluralisme Agama Di Indonesia Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa, *Al-Adyan Journal of Religious Studi*, | Volume 1, Nomor 1, <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1714>

✉ Corresponding author:

Email Address: rasyidah@ar-raniry.ac.id

Received: April 29, 2022; Accepted: September 18, 2022; Published: September 30, 2022

Copyright © 2022 Rasyidah, Mustabsyirah Husein, Husna Amin, Dwi Dendi, Masrizal DOI:

<http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i2.13211>

Rasyidah, Mustabsyirah Husein, Husna Amin, Dwi Dendi, Masrizal
DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i2.13211>

- Mahmuiddin, Amirulkamar, S., & Hidayati, U. (2023, December). A Model of Extreme Poverty Reduction to Prevent Social Inequality in Indonesia Perspective of Sociology and Islamic Law. In *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* (Vol. 23, No. 2, pp. 215-228).
- Misbah, T. L., Ashura, K., Wirianto, D., Masrizal, M., & Rustan, E. (2023). Application of the structural guidance model for muallaf banda aceh in strengthening education islamic values. *Relações Internacionais no Mundo Atual*, 3(41), 382-396.
- Parhan, Muhamad, & Dara Puspita Dewi Kurniawan, (2020), Aktualisasi Peran Ibu Sebagai Madrasah Pertama Dan Utama Bagi Anak Di Era 4.0, *JMIE: Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education*, Volume 4, Nomor 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.32934/jmie.v4i2.193>
- Putri, Givani Anisa, Imron A. Hakim, & Evy Ratna Kartika Wati, (2019), Dinamika Kelompok pada Majelis Taklim Jami'atul Muslimah di Desa Mataram Kabupaten Musi Rawas, *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, Volume 3, Nomor 1, DOI: [10.15294/pls.v3i1.30889](https://doi.org/10.15294/pls.v3i1.30889)
- Rachman, Budhy Munawar, (2011), *Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam Di Kanvas Peradaban*, Edisi Digital, Jakarta, Yayasan Abad Demokrasi
- Shonhaji, 2017, Keterlibatan Perempuan Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Pada Masyarakat Multietnik Di Lampung, *Jurnal TAPIS Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 14 No.01, <http://dx.doi.org/10.24042/tps.v13i1.1397>
- Suri, Sufian, (2019), Mendampingi Masyarakat dalam Majelis Taklim Sebagai Kegiatan Pengajian Mingguan di Gampong Ceumeucet, Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, *Ibrah: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol 01 Nomor 01, <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/ibrah/article/view/576>
- Suryadi, (2017), Teologi Inklusif Nurcholish Madjid (Pemikiran Tentang Pluralisme Dan Liberalisme Agama, *Jurnal Manthiq*, Vol. 2, No. 1, <https://doi.org/10.29300/mtq.v2i1.426>
- Wattimena, Anastazia Niatry & Grace F. Irene Hutabarat, (2021), Pengaruh Femininitas Perempuan Dalam Negosiasi Konflik, *Journal of International Relation (JoS)* | Vol. 1 | September, <https://unimuda.e-journal.id/jurnalhubunganinternasional/article/view/1509/795>
- <http://aceh.tribunnews.com/2015/06/26/menyoal-benturan-antarmazahab-di-aceh>
- <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/27/persoalan-masjid-roya-dimuzakarkan>.
- <https://kumparan.com/acehkini/warga-bubarkan-pengajian-ustaz-firanda-andirja-di-banda-aceh-1rGsjEmx1pr/full>
- <https://kumparan.com/acehkini/sekelompok-massa-hentikan-pengajian-ustaz-farhan-di-masjid-oman-aceh-1sj3jr2OdQG/full>
- <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/10/18/oy08pv396-muhammadiyah-usut-kasus-pembakaran-masjid-di-aceh>

<https://www.benarnews.org/indonesian/wahabi-09102015190337.html>